

**PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA SATUAN
PENDIDIKAN SWASTA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
MERDEKA BELAJAR**

Fatkhuri

Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : fatkhuri@upnvj.ac.id

Abstrak

Pendidikan adalah mandat konstitusi yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara. Dengan berbagai keterbatasan sumber daya khususnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan selama ini melibatkan partisipasi masyarakat melalui satuan pendidikan swasta. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka melakukan kajian yang dilakukan melalui pendampingan penyusunan pedoman tata kelola SMA Swasta di Indonesia. SMA Swasta di Indonesia merupakan salah satu satuan pendidikan yang memainkan peran penting dalam penyelenggaraan program pembelajaran untuk mencerdaskan anak bangsa. Namun demikian, tata kelola sekolah swasta belum mendapatkan perhatian secara penuh dari pemerintah. Oleh karena itu, tidak ada standar baku yang menjadi acuan bagi sekolah swasta sehingga fakta dan dinamika penyelenggaraan pendidikan di lapangan sangat bervariasi. Kegiatan pendampingan penyusunan pedoman tata kelola SMA Swasta ini merupakan program penting guna melakukan kajian untuk mencari bentuk tata Kelola SMA Swasta terbaik di Indonesia. Pengkajian yang memfokuskan terhadap pola pengelolaan keuangan (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan) SMA Swasta perlu dilakukan sehingga ada standarisasi penyelenggaraan pendidikan di SMA Swasta. Dengan demikian, pemerintah bisa melakukan intervensi secara tepat dan terukur untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan SMA Swasta secara lebih efektif di masa depan.

Kata Kunci: Pedoman, SMA, Swasta, Tata Kelola, Keuangan

Abstract

Education is a constitutional mandate in which its fulfilment becomes the responsibility of the government. With various limitations in resources, especially the budget owned by the government, the implementation and management of education have involved community participation through private educational institutions. This community involvement is carried out in the context of conducting studies carried out through the guidance of organizing private high schools in Indonesia. Private high schools in Indonesia are one of the educational institutions that play a significant role in the implementation of learning programs to educate all children in the nation. However, the arrangement of private schools has not received full attention from the government. Therefore, there are no standardized benchmarks for private schools, resulting in a wide variation in the facts and dynamics of education in the field. The guidance program for organizing private high schools is an important initiative to conduct a study to find the best governance model for private high schools in Indonesia. A focus on financial management patterns (planning, implementation, and supervision) of private high schools needs to be conducted to establish standardized education practices. Accordingly, the government can intervene accurately and measurably to support more effective future implementation of private high school education.

Keywords: Guidelines, Senior High School, Private, Governance, Finance

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan mandat konstitusi yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara. Mutu satuan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pengelolaan satuan pendidikan harus sesuai standar yang ditetapkan (Fatkhuri & Nurdin, 2023). Namun demikian, dengan berbagai keterbatasan sumber daya khususnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan di Indonesia saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat melalui sekolah swasta. Selama ini terbatasnya anggaran pemerintah untuk menjangkau penyelenggaraan pendidikan salah satunya disebabkan oleh belum semua pemerintah daerah berkomitmen memberikan alokasi anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dari APBD sesuai amanat konstitusi (Christianingrum, 2018; Fatkhuri, 2019). Dengan jumlah populasi sekolah swasta yang sangat besar, maka keterlibatan masyarakat dalam turut serta mengelola pendidikan menjadi faktor krusial untuk memastikan pelayanan pendidikan berjalan secara optimal.

Jumlah sekolah swasta di Indonesia saat ini berkembang begitu pesat di mana pertumbuhan dari tahun ke tahun meningkat cukup signifikan. Pada tahun ajaran 2021/2022, sekolah swasta mengalami kenaikan cukup drastis pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yaitu lebih dari 1.000 sekolah baru. Sedangkan untuk sekolah negeri, pada tahun ajaran 2021/2022 untuk jenjang yang sama justru mengalami penurunan dibandingkan tahun ajaran 2020/2021 (Agustina, dkk. 2023). Jumlah sekolah di Indonesia yang meliputi jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK sampai tahun 2022 sebesar 218.600 sekolah. Dari total jumlah tersebut, sekolah dengan status swasta mendominasi pada jenjang menengah dengan proporsi untuk SMA 50,42 persen dan SMK 74,20 persen (Agustina, dkk. 2023).

Terkait satuan pendidikan jenjang SMA dengan status Swasta, saat ini sekolah tersebut berjumlah 7.062 dari total 14.007 sekolah (Agustina, dkk. 2023). Dengan jumlah populasi yang cukup besar, SMA Swasta memainkan peran penting dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu, keberadaan SMA Swasta penting untuk memperoleh perhatian pemerintah, terutama untuk memberikan dorongan agar satuan pendidikan tersebut terus meningkatkan mutunya, melalui berbagai kreatifitas dan inovasi dalam pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sebagai bagian penting dari institusi yang turut serta memberikan sumbangsih nyata dalam dunia pendidikan, SMA Swasta selama ini belum tersentuh oleh regulasi pemerintah secara memadai. Kondisi tersebut menyebabkan dalam konteks pengelolaan, SMA Swasta memiliki variasi yang cukup kompleks. Kompleksitas tata kelola yang dimiliki satuan pendidikan ini selanjutnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk melakukan kajian. Kajian yang dilakukan difokuskan pada analisis terhadap berbagai aspek penting dan karakteristik yang dimiliki oleh SMA Swasta di Indonesia sehingga dapat menghasilkan bahan sebagai dasar dalam memformulasi kebijakan di masa depan. Dalam konteks ini, kajian dilakukan untuk melihat secara mendalam bagaimana tata kelola satuan pendidikan ini, khususnya dalam upaya memastikan pengelolaan SMA Swasta baik dalam konteks organisasi maupun tata kelola keuangan sekolah diatur secara profesional yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi institusi pendidikan tersebut.

Merujuk pada poin-poin sebagaimana diuraikan di atas, pendampingan dalam penyusunan pedoman tata kelola ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu mitra dalam rangka melakukan analisis terhadap pengelolaan SMA Swasta di Indonesia. Hasil analisis ini menghasilkan potret penyelenggaraan SMA Swasta terutama terkait bagaimana penerapan tata kelola satuan pendidikan dari perencanaan, penyelenggaraan program dan

evaluasinya khusus pada isu kemandirian sekolah sasaran yang pada tahap selanjutnya dituangkan ke dalam pedoman tata kelola SMA Swasta di Indonesia.

2. METODE PELAKSANAAN

Sasaran dari kajian ini melibatkan SMA Swasta di 34 Propinsi, dengan tujuan antara lain untuk: 1) mengetahui perencanaan dan pengelolaan keuangan sekolah; 2) mengetahui realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah; 3) mengetahui kondisi pengelolaan keuangan sekolah. Pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan pedoman tata Kelola SMA Swasta dilaksanakan dari bulan September sampai Desember 2022. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pejabat dan staf pegawai di Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbudristek. Selanjutnya, kegiatan ini juga melibatkan kepala sekolah di beberapa SMA Swasta terpilih. Kehadiran para kepala sekolah ini dalam rangka berbagi pengalaman mengenai tata kelola satuan pendidikan di bawah kewenangan mereka. Pendekatan dalam kegiatan pendampingan ini menggunakan *Participative Active Learning (PAL)*. Pendekatan ini dipilih dalam rangka mendorong para peserta secara aktif dalam kegiatan penyusunan pedoman tersebut (Afrimadona; Fatkhuri; Shanti Darmastuti, 2022). Implementasi pendekatan ini menuntut semua yang terlibat untuk memiliki persepsi yang sama. Selanjutnya, kegiatan dilakukan secara bertahap untuk melaporkan serta mengevaluasi progres penyusunan dari pedoman ini. Di samping itu, pendampingan yang bersifat interaktif juga digunakan untuk mendorong setiap peserta memberikan ide maupun gagasan sampai tersusunnya pedoman tata kelola SMA Swasta ini. Berdasarkan pendekatan tersebut di atas, selain tim pendamping menyampaikan materi terkait dengan substansi dan strategi pelaksanaan kegiatan, peserta juga secara aktif melakukan diskusi dalam penyusunan draf pedoman tata kelola (Afrimadona; Fatkhuri; Shanti Darmastuti, 2022). Secara lebih detail, kegiatan pendampingan dilaksanakan melalui empat tahapan kegiatan meliputi: persiapan, pengumpulan bahan/materi, penyusunan indikator tata kelola SMA Swasta dan uji keterbacaan, pelaksanaan survei, penyusunan laporan, dan penyusunan revisi pedoman tata kelola SMA Swasta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian tata kelola SMA Swasta bagi Kemendikbudristek memegang peranan penting. Kajian yang memfokuskan pada upaya untuk memahami bagaimana mendorong sekolah untuk melibatkan partisipasi publik untuk mempercepat kemandirian satuan pendidikan telah menjadi kebutuhan mendesak ditengah terbatasnya sumber-sumber pembiayaan untuk mendanai program pendidikan. Kemandirian sekolah menjadi modal yang sangat penting bagi satuan pendidikan. Susilo (2016) menguraikan bahwa sekolah yang mandiri umumnya memiliki sebelas ciri, satu diantaranya yaitu kreatifitas dalam melakukan penggalan dana (Nasori, 2016). Selanjutnya, satuan pendidikan juga perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini sejalan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, mendorong sekolah untuk memiliki kreatifitas dan membuka ruang partisipasi publik menjadi sebuah keniscayaan sehingga tujuan pendidikan bisa terwujud secara efektif. Pengelolaan satuan pendidikan merupakan aspek penting dalam upaya mendorong penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 pasal 27 tentang Standar Nasional Pendidikan, pemerintah mengatur bahwa pengelolaan satuan pendidikan, yang notabene merupakan kriteria minimal dalam penjaminan mutu pendidikan harus mencakup hal-hal yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan agar penyelenggaraan

Pendidikan efisien dan efektif (Peraturan Pemerintah 57 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 2021).

Hasil pendampingan penyusunan pedoman tata kelola SMA Swasta dapat diuraikan sebagai berikut.

Pada tahap persiapan tim mendiskusikan terkait rencana pelaksanaan kajian. Dalam tahap ini, tim melakukan *brainstorming* untuk menggali ide dan gagasan, serta dalam rangka menyamakan persepsi mengenai tujuan dari kajian penyusunan pedoman tata kelola SMA Swasta tersebut. *Brainstorming* ini sangat penting sebab tahap ini memungkinkan tim untuk berfokus pada pemecahan masalah secara kolektif. Dengan mengumpulkan banyak ide dari berbagai sumber, ada peluang lebih besar untuk menemukan solusi yang inovatif dan efektif. Pada tahap selanjutnya, tim melakukan pembahasan kerangka kajian. Dalam tahap ini disepakati bahwa dalam rangka menyusun naskah kajian tata kelola SMA Swasta, kerangka kajian dan instrumen perlu ditetapkan. Hasil diskusi yang cukup panjang kemudian menghasilkan rumusan variabel dan indikator yang ditetapkan sebagai kerangka acuan dalam melakukan kajian. Variabel yang disepakati yaitu: peran yayasan sebagai variabel X1, peran pemerintah daerah (X2), peran pemerintah pusat (X3), peran orang tua (X4), dan tata kelola keuangan SMA Swasta sebagai variabel Y. Sedangkan untuk indikator yang disepakati yaitu: regulasi, pendanaan, dan pendampingan (indikator dari variabel X1); regulasi, pendanaan, dan pendampingan (indikator dari variabel X2); regulasi, pendanaan, dan pendampingan (indikator dari variabel X3); dukungan pendanaan dan pendampingan (indikator dari variabel X4); dan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ((indikator dari variabel Y).

Berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan pada tahap ketiga. Pada tahap ini penyusunan instrumen survei dan penentuan sampel dilaksanakan. Penyusunan instrumen survei merujuk pada indikator-indikator yang telah disepakati sebelumnya (lihat pada tahap kedua). Pada tahap ini, pengabdian menyusun rancangan instrumen menggunakan pertanyaan tertutup yang memuat lima opsi jawaban yang terdiri atas pilihan jawaban A (sangat tidak setuju), B (tidak setuju), C (cukup setuju), D (setuju), dan E (sangat setuju). Rancangan instrumen (kuesioner) survei memuat 53 pertanyaan yang akan diberikan kepada SMA Swasta terpilih (sampel). Sementara itu, untuk menentukan sampel, pengabdian menetapkan populasi SMA Swasta yang memenuhi kriteria peringkat akreditasi A (sangat baik), B (Baik), dan C (Cukup). Total jumlah SMA Swasta yaitu 7.194 SMA di 34 provinsi dan dari populasi tersebut, diambil sampel 365 sekolah.

Pada tahap keempat, pengabdian melaksanakan kegiatan uji keterbacaan. Uji keterbacaan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menelaah sejauh mana teks atau tulisan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Proses tersebut melibatkan analisis terhadap faktor-faktor seperti panjang kalimat, kompleksitas kata-kata, struktur kalimat, dan penggunaan bahasa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa teks dapat diakses dan dimengerti oleh berbagai tingkat pembaca, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat efektif sampai kepada target audiens. Uji keterbacaan ini membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Dalam implementasinya, uji keterbacaan merupakan tahapan kegiatan yang sangat krusial untuk menguji apakah item-item yang telah disusun memenuhi kaidah seperti mudah difahami baik secara substansi maupun bahasa, apakah item dapat dilaksanakan, dan apakah item telah menggambarkan tata kelola yang terjadi di SMA Swasta terpilih sebagai sampel. Dalam uji keterbacaan, aspek yang tidak kalah penting adalah untuk meminta peserta agar bisa memberikan masukan terkait kejelasan dan relevansi pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur konteks dan proses pengelolaan keuangan satuan pendidikan SMA Swasta. Tahap kelima yaitu penyusunan laporan. Pada tahap ini pengabdian melakukan pengolahan

data dari hasil isian kuesioner yang telah diisi oleh sekolah. Tahap ini mencakup Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Kajian Pustaka, Bab 3 Metode, Bab 4 Hasil dan Pembahasan dan Bab 5 Kesimpulan.

Secara umum, pendampingan penyusunan pedoman tata kelola SMA Swasta ini memberikan manfaat bagi pemerintah. Bagi Kementerian, hasil pendampingan ini menjadi masukan yang sangat berharga sebagai dasar melakukan intervensi kebijakan. Hasil tersebut memperlihatkan kebutuhan perlunya menyusun regulasi atau kebijakan yang mendukung kemandirian pengelolaan khususnya keuangan SMA Swasta. Berikutnya bagi pemerintah daerah, hasil pendampingan kajian tata kelola SMA Swasta ini menjadi masukan dan rekomendasi bagi kebijakan lokal untuk mendukung kemandirian pengelolaan SMA Swasta.



Gambar 1. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Pedoman Tata Kelola SMA Swasta



Gambar 2. Kegiatan Pengolahan Data Hasil Survei

4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan penyusunan pedoman tata kelola SMA Swasta merupakan kegiatan dalam rangka melakukan kajian tentang tata Kelola SMA Swasta. Selama ini pemerintah belum memiliki hasil kajian yang komprehensif sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan terhadap SMA Swasta. Dalam konteks tersebut, pengkajian terhadap pola pengelolaan keuangan (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan) SMA Swasta perlu dilakukan. Penelitian untuk mengetahui sejauhmana tata kelola keuangan SMA Swasta efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan menjadi *resources* yang sangat berharga. Langkah ini perlu dilakukan untuk melakukan intervensi kebijakan bagi pemerintah terhadap SMA Swasta agar memiliki kemandirian dan kreatifitas

di masa depan. Hasil pendampingan penyusunan pedoman tata kelola ini menunjukkan manfaat yang sangat besar bagi pemerintah. Manfaat tersebut diantaranya adalah pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan intervensi kebijakan terkait pengelolaan SMA Swasta khususnya yang terkait dengan upaya mendorong satuan Pendidikan lebih mandiri. Dengan hasil tersebut, diharapkan ada tindaklanjut dari Kemendikbudristek terkait bagaimana mengatur SMA Swasta terutama dalam aspek pendanaan yang perlu diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrimadona, Fatkhuri, Shanti Darmastuti. (2022). Pendampingan Penyusunan Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Bawaslu. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(10), 1146–1155.
- Agustina, R. dkk. (2023). Statistik Pendidikan 2022. In *Badan Pusat Statistik RI*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/judwx>
- Christianingrum, R. (2018). The Effect Of Education Budgets On Indonesian Education Development Ratna Christianingrum*. *Jurnal Budget*, 3(2), 64–98.
- Fatkhuri & Nurdin. (2023). Pelatihan Sistem Penilaian Akreditasi Berbasis Elektronik (SISPENA) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(5), 504–509. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/swarna/article/view/518>
- Fatkhuri, F. (2019). Desentralisasi Pendidikan di Indonesia : Korupsi dan Problem Politik Kekuasaan. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 278–297. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v3i2.874>
- Nasori, N. H. (2016). Kemandirian Sekolah Dalam Pengelolaan Pembiayaan Di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan*, 118–127.
- Peraturan Pemerintah 57 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, (2021).